



Prosedur Operasional Standar (POS)

**PENGAJUAN PENETAPAN RENCANA
IMPLEMENTASI (JADWAL TRIWULANAN)**

No. 08/IT1.B06/OT.02/2023

Institut Teknologi Bandung
2023

Prosedur Operasional Standar (POS)

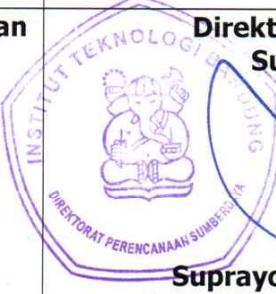
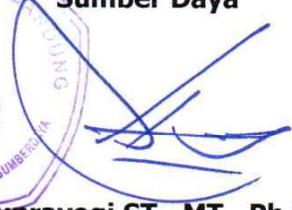


PROSEDUR PENGAJUAN PENETAPAN RENCANA IMPLEMENTASI (JADWAL TRIWULANAN)	Nomor	: 08/IT1.B06/OT.02/2023
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 2 Januari 2021
	Halaman	: 1 dari 4

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Analisis Program dan Anggaran  Sofyan Sutrisna, S.Li. NIP 19800924 20149 1 001	 Direktur Perencanaan Sumber Daya  Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 21 Maret 2023	Tgl. 22 Maret 2023

Disetujui oleh:
 Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 31 Maret 2023



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Nomor SOP	: 08/IT1.B06/OT.02/2023
Tanggal Pembuatan	: 21 Maret 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 2 Januari 2021
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan	



Muhammad Abdul, M.T., Ph.D.
NIP 196908151995121002

Nama POS
Pengajuan Penetapan Rencana Implementasi Triwulan (Jadwal Triwulanan)

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami prosedur penetapan Rencana Implementasi
2. Dapat mengaplikasikan aplikasi SISPRAN
3. Memahami alur penginputan Rencana Implementasi dan ketentuan terkait RI lainnya

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Surat edaran penetapan jadwal Rencana Implementasi triwulan
4. Disposisi dari WRURK

Pencatatan dan Pendataan:

Dicatat dan didata pada JDIIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara *soft copy* maupun secara manual.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB;
5. Surat Keputusan Rektor No. 259/PER/IT1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerma dengan Mitra ITB PTN BH.

Keterkaitan:

-

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Prosedur Pengajuan Penetapan Rencana Implementasi Triwulan

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		WRURK	Dit. Perencanaan	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)	
1	Membuat surat penetapan jadwal Rencana Implementasi Triwulanan				Draft surat	5 menit	Surat edaran	Surat dibuat per triwulan ditetapkan jadwal hanya berlaku untuk sispran operasional
2	Menyebarkan Surat penetapan jadwal RI ke seluruh unit kerja dan menembuskan ke Direktorat Perencanaan Sumber Daya				Disposisi Surat Edaran	5 menit	Surat edaran	
3	Membuka jadwal rencana implementasi pada aplikasi sispran sesuai jadwal yang telah ditetapkan					30 menit		
4	Melakukan penginputan RI sesuai jadwal yang ditetapkan					tergantung banyaknya RI		
5	Approve pimpinan unit kerja					tergantung banyaknya RI		
6	Pemilihan sumber dana berdasarkan ADO/Kegiatan dan transfer ke aplikasi oracle					tergantung banyaknya RI		

Lampiran 1 – Pengertian dan Batasan Prosedur Pengajuan Penetapan Jadwal Rencana Implementasi Triwulan

I. Tujuan

Tujuan dari POS ini adalah sebagai panduan pelaksanaan teknis dan administratif berkaitan dengan proses penetapan rencana implementasi triwulan sehingga memudahkan bagi para unit kerja dalam melaksanakan proses pengajuan.

II. Pengertian dan Batasan

A. Pengertian

1. Rencana Implementasi (RI) adalah rencana kegiatan unit kerja yang akan dilakukan/ dilaksanakan dalam satu satuan waktu (per bulan/ triwulan/ tahunan) berdasarkan pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan telah disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (Belanja Pegawai, Barang, Jasa dan Modal).

B. Batasan

Rencana Implementasi di inputkan pada kelompok bidangnya saja.

III. Indikator Keberhasilan

1. Penginputan Rencana Implementasi berjalan lancar sesuai prosedur.
2. Pembayaran untuk kegiatan tepat waktu.